

**IMPLEMENTASI STRATEGI PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGGING* DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN
OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

AYU SEPTIANI



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTAS STRATEGI PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGGING* DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh
Ayu Septiani

Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman mengalami kerusakan akibat *illegal logging* seluas 5.181,3 Ha. Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung memiliki beberapa strategi untuk menanggulangi *illegal logging*, yaitu: secara interen di dalam tahura melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu, membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhadap *illegal logging*, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap *illegal logging*. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : bagaimana Implementasi Strategi Dinas hutan (Dishut) Provinsi Lampung dalam Penanggulangan *illegal logging* dan apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung dalam Implementasi strategi penanggulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknk pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi penanggulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung. Pada Tahap perencanaan dan fungsi pengendalian belum berjalan baik, sedangkan pada tahap pengorganisasian telah berjalan baik. Kendala-kendala yang dihadapi ?(Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung dalam penanggulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman, antara lain : belum tersedianya *website*, minimnya sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim pemahaman tetang pembinaan masyarakat.

Ayu Septiani

Adapun masukan yang peneliti dapat berikan kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung adalah harapan kedepannya Pam Swakarsa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatan budaya koordinasi harus tetap dijaga, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung bukan hanya berfokus kepada pengamanan tetapi juga lebih memberi pemahaman mengenai *illegal logging* kepada masyarakat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung harapannya mengoptimalkan fungsi *website* sebagai media informasi publik.

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Implementasi Strategi, *Illegal Logging*

ABSTRACT

THE COUNTERMEASURE STRATEGI IMPLEMENTATION OF ILLEGAL LOGGING IN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN AREA BY KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

By

Ayu Septiani

Illegal logging is illegal wood cutting and violates the laws and regulations. Nowadays, the area of Watershed (DAS) of Forest Park Conservation Area (Tahura) Wan Abdul Rachman is experiencing damage due to illegal logging of 5,181.3 Ha area. The Dinas Kehutanan Provinsi Lampung has done several strategies to countermeasure the illegal logging, namely: internally, conducting routine patrols within the forest park by Forest Police personnel at existing wood sites, establishing Pam Swakarsa (Civilian Volunteer Militia) in order to assist the monitoring of illegal logging, and conducting guidance to the community from area manager and the local communities to cooperate in preventing illegal logging. Based on the background of the problem above, the research was formulated into 2 (two) research questions, how is the implementation of Dinas Kehutanan Provinsi Lampung in handling illegal logging and what are the obstacles faced by the Dinas Kehutanan Provinsi Lampung in the implementation of illegal logging strategy in Tahura Wan Abdul Rachman?

This research was a descriptive research with qualitative approach. The data collection technique was completed through interviews, documentation, and observation. While the technique of data validity was done by means of triangulation.

The results of this research indicated that the implementation of the strategy of illegal logging eradication at Wan Abdul Rachman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung was as follows. At the planning stage, the control function had not been running well, while at the organizing stage, the control had been running well. The obstacles encountered by Dinas Kehutanan Provinsi Lampung in handling illegal logging at Wan Abdul Rachman Forest Park, included: the unavailability of website, the inadequate number of facilities and infrastructure, and the limited understanding of human resources towards community development.

Ayu Septiani

The researcher suggested that the Dinas Kehutanaan Provinsi Lampung expected that Pam Swakarsa (Civilian Volunteer Militia) should keep maintaining the following activities to be implemented, the coordination of cultural activities must be maintained, the Dinas Kehutanaan Provinsi Lampung should not only focus on the security but also gives more socialization about illegal logging to the community, and it is expected that Dinas Kehutanaan Provinsi Lampung optimizes the function of the website as a medium of public information.

Keywords: Strategy Management, Strategy Implementation, Illegal Logging

**IMPLEMENTASI STRATEGI PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGGING* DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN
OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

AYU SEPTIANI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI STRATEGI
PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGGING* DI
TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN
OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ayu Septiani**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041022

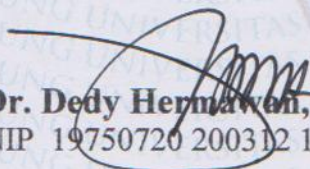
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

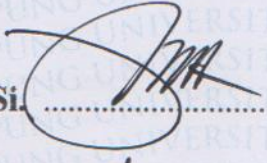

Devi Yulianti, S.AN., M.A.
NIP 19850705 200812 2 004

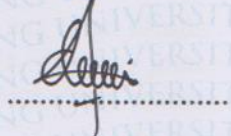
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

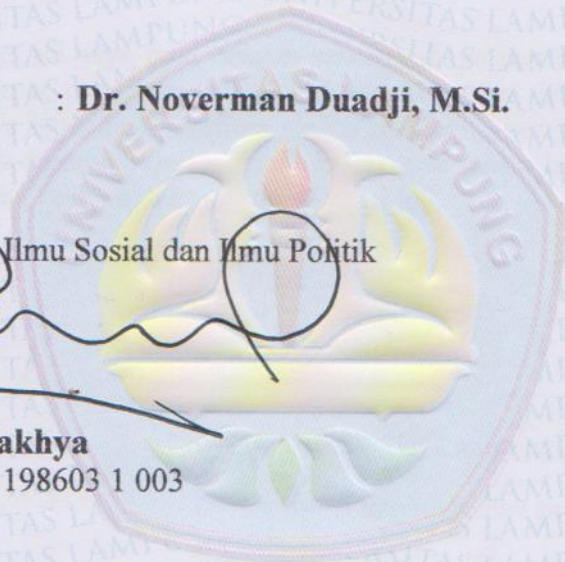
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. 

Sekretaris : Devi Yulianti, S.AN., M.A. 

Penguji Utama : Dr. Noverman Duadji, M.Si. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Agustus 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,



Ayu Septiani

NPM 1216041022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayu Septiani, lahir Desa sukomoro, kabupaten Belitang, Palembang Sumatera Selatan, pada tanggal 26 September 1994. Penulis merupakan anak Kedua dari dua bersaudara Yaitu Sri Wahyuni Amd.Keb. Penulis lahir dari pasangan Bapak Sumaji dan Ibu Rusmiahtun.

Pendidikan formal yang telah ditempuh yakni pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Tekorejo diselesaikan tahun 2006. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama di SMP Ponegoro diselesaikan pada tahun 2009 dan selama itu penulis mengikuti Pramuka. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas LPB (Lembaga Pendidikan Belitang) 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Penulis sebagai Anggota di Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) Republica Fisip Unila Pada Tahun 2013-2014. Selain itu penulis juga tergabung dalam organisasi kedaerahan yakni Ikatan Mahasiswa Oku Timur (IKAM OKUT)

Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Toto mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari.

PERSEMBAHAN

*Dengan menyebut nama Allah SWT...
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk
Allah SWT yang dengan segala ketulusan hati kuucapkan puji
Syukur atas karunia yang maha besar*

*Ibundayang akan sllu dihati dan pikiranku
Ayah serta kakakku tercinta yang selalu
Memberikan yang usaha terbaik untukku
Terimakasih atas segala dukungan moril maupun materil,
Pengorbanan, kesabaran, dan Do'a
Dalam menyongsong masadepnku.*

*Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan
Kepada*

Naunganku HIMAGARA

*Sahabat-sahabatku, Temanku, Adik, Kakak Tingkatku
Yang telah menjadi bagian dalam hidupku*

Para Pendidik dan Almamater tercinta. . . .

MOTTO

Cara untuk menjadi didepan adalah memulai sekarang, jika memulai sekarang,tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu.

(William Feather)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang ditakdirkan pada suatu kaum sebelum mereka berusaha mengubah keadaan yang ditakdirkan pada diri mereka sendiri.

(Qs.Ar-Ra'du:11)

Jangan pernah berfikir gagal sebelum mencoba, terus berusahalah dan kesabaran akan membawa keberuntungan.

(Ayu Septiani)

SANWACANA

Assalammualaikum Wr Wb

Alhamdulillah rabbil'alamina tercurah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Strategi Penanggulangan *Illegal Logging* di Tahura (Taman Hutan Raya) Wan Abdul Rachman Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis telah berupaya sebaik mungkin dan seminimal mungkin namun apabila pembaca menemukan kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku pembimbing Utama. Terima kasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang telah banyak

membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang selalu di sampaikan agar selalu berusaha dan jangan cepat menyerah.

2. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A. selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang selalu di sampaikan agar selalu berusaha dan jangan cepat menyerah.
3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku pembahas dan penguji bagi Penulis sekaligus selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara . Terima kasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis untuk memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik mencapai kesuksesan.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA (Bapak Prof. Dr Yulianto, M.S, Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si, Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos. M.Ap, Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.SI, Ibu Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si, Ibu Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP, Bapak Fery Triatmojo, S. A.N., M.AP, Ibu Suasana Indriyati, S.IP., M.SI, Ibu Meliayana, S.IP., M.A, Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N. M.A Ibu Selvi Diana, dan Pak Izul). Terima kasih atas segala ilmu yang telah

penulis peroleh di kampus semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.

7. Ibu Nur selaku Staff jurusan Ilmu Administrasi Negara yang cantik, ramah, dan memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi ini
8. Segenap informan penelitian Bapak Sumardi S.Hut.M.M selaku UPTD Tahura, Bapak Yuridis S.H Selaku Polisi Hutan (Polhut), Bapak Bahrudin Selaku Kepala desa margodadi kecamatan way lima. Bapak Nazib selaku masyarakat. Bapak yang baik, ramah, walaupun tidak berlanjut ke tahap selanjutnya tetapi telah banyak membantuk penulis dalam menyelesaikan skripsiku, semoga kebaikan bapak” di balas sama Allah SWT.
9. Kedua orang tuaku Ayah Sumaji dan Ibu Rusmiahtun terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do’a yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir
10. Terimakasih untuk Kakek H.Al Mukarom,Nenek Hj.Romawati Kasmowiryo atas Nasehat dan Doa yang sllu dipanjatkan untuk penulis dalam mencapai Gelar Sarjana.
11. Terimakasih untuk saudara kandungku Sri Wahyuni Amd.Keb yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
12. Keluarga besarku yang di Sukarame Ibu, Bapak angkatku ibu Hj mulyati, H.Sholihin. mb nurul, mas heri cahyono, Mas Arman, Mas Ari, MbK Oni leterina, mbk lastri. Terima kasih atas kebersamaan, doa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga nasihat yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.

13. Buat anak kosan Mbak Eri. Mbak Eka, Leni, Indah makasih banyak buat kalian selama buat doa nya, motivasi, buat selalu ada nya, canda tawa kalian yang buat aku gak jadi galau mikirin skripsi ini.
14. Terimakasih untuk sahabat terbaik yang slalu membantu menjadi penyemangat disetiap hariku Purnama Sari T,Serliani,Asita Yanis,Anisa Rahmawati,Rezki Anantama,Bery Decky Saputra,Rifky Andriansyah.
15. Terima kasih buat teman – teman seperjuangan ANE 2012 (AMPERA) Purnama sari T,Serliani,Asita yanis,Aris, Ageng, Alga Devicho, Ahmad Sulaiman, Anis Rahmawati, Anis, Ajeng, Mutiara Safitri,Ageng, Akbar Hari Wijaya, Alfajar, Ali Firdaus, Andre Pratama, Guruh, Ayu Tsanita, Ayu Widya Puspita, Bayu Kurniawan, Bery Decky Saputra, Betty Indah Rahmawati, Chairani Salamah, Dewi, Dian, Dwini,Dianisa,Herlina, Emi Marta, Endry Ardiyanto, Ernawati, Fadilla Nuari, Firdalia, Fitri Rustiana,Ghea,Ica Yulita, Imam Khoirudiin, Ikhsan, Ikhwan, Iyaji, Siti Muslimah, Intan, Johansyah, Kiki, Kirana, Lena, Lianse, Antonia, si kembar Icup dan Ipul, Alan, Irlan, Maya, Melda Budiarti, Putu indra jaya ,Rezki Anantama, Mutiara, Melisa, Eko, Nadiril, Novaria, Novita Sari, Rifky Andriansyah, Rifky Hidayatur Rahaman, Richa Mollytha, Sholeh Ridlwan, Silvia Tika, Stefani Wulandari , Omega, Quqila, Rhani Umay, Ria Shellawati, Ridha Ayu Amalia, Suci, Silvia Yolanda, Taufik, Widji Ramadhani, Yeen Gustiance, Yoanita, dan Yuyun,Ahmad Hamdani.alex tupang. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, canda tawa, dukungan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga pertemanan dan komunikasi kita selalu terjalin walaupun kita sudah lulus ☺ tetap semangat ampera sukses buat kita semua aamiin

16. Terima kasih untuk teman – teman KKN Desa Toto Mulyo Kec Way Bungor Kab. Lampung Timur, Debi Rizal, Ashido, Anggun P, Akbar, Agus, Apri
Terima kasih buat pengalaman 40 hari yang lucu”an, berkesan, dan yang tak terlupakan sampai kapanpun.
17. Abang dan mbak HIMAGARA: bang ciko, bang Aden, Bang rendi, mbak nindi, mbak manda, mbak farah, mbak vike youdit, Bang Fajrin, Bang Datas, Bang Ali, Bang Joko, Mbak Bunga Janati, Bang Heliyus Kagami, bang datas jaya melinting, bang Ari Wijaya, bang Cindang. Terima kasih bang, mbak buat nasihat dukungan, dan bantuannya selama ini.
18. Adik - adik HIMAGARA yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena sanking banyaknya, selama ini kalian telah menyupport dan menemani penulis baik di kampus maupun di luar kampus tetap semangat dan jangan pernah menyerah untuk berproses di HIMAGARA.
19. Para pembahas mahasiswa/i dan moderatorku dari proposal dan hasil (Bery Decky Saputra, Purnama Sari T, Rezki Anantama, Bj Sedy Pratama, Ratu Fitriana) Terima kasih banget telah udah meluangkan waktu nya untuk kritikkan dan saran yang kalian berikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
20. Buat Someone yang jauh dimata namun dekat dihati yang dirahasiakan namanya terimakasih sudah mengisi hari hari penulis dengan canda tawa, perhatian, dan motivasi. Selalu menyemangatiku untuk mendapatkan Gelar Sarjana, Jangan pernah lelah dan bosan untuk menghadapi tingkah orang yang mengesalkan.
21. Sahabat IKAM (Ikatan Mahasiswa Oku Timur) Arief Junaidi, fery Sandria, Agung Cahyono, Linda NF, Evi Martina, Indah Lestari, Ulfa Aulia, Nanik

Puspita Sari, Trio Saputra, Eric, Yuyun Fitriani, Mbak diah, Anggun Wulandari, Rama Handika, Nita, Nyokro Mukti W, Sani Setiawan, Tyas Abror Huda, Yuke Yoganda, Yusuf Bahtiar, Riska Ferawati. Serta sahabat yang lainya tak bisa disebutkan lagi namanya sangking banyaknya terimakasih atas kelucuan, tingkah konyol canda tawa kalian.

22. Terimakasih untuk kak Birin yang sudah membantu dalam proses ngprint. Semoga Prada Net selalu rame ya kak
23. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung
24. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “Terima Kasih dan Maaf” atas semuanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2017
Penulis

Ayu Septiani
NPM: 1216041022

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi	13
2.1.1 Pengertian Strategi	13
2.1.2 Tipe-Tipe Strategi	15
2.1.3 Pengertian Manajemen Strategi.....	17
2.1.4 Manfaat Manajemen Strategi	21
2.1.5 Tahap-Tahap Manajemen Strategi.....	22
2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Strategi.....	24
2.2.1. Pengertian Implementasi Strategi	24
2.2.2. Model Implementasi Strategi	25
2.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Strategi	29
2.2.4. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Strategi.....	30
2.3 Tinjauan Tentang <i>Illegal Logging</i>	32
2.4 Dampak <i>Illegal Logging</i>	34
2.5 Kerangka Pikir	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian	39
3.3 Lokasi Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan data.....	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.6 Teknik Keabsahan Data	45

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	48
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	48
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	49
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	51
4.2 Profil Tahura Wan Abdul Rachman.....	52
4.2.1 Tugas dan Fungsi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	52
4.2.2 Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	53
4.2.3 Komposisi SDM UPTD Tahura Wan Abdul Rachman.....	54
4.2.4 Letak Geografis Tahura Wan Abdul Rachman	54
4.2.5 Jenis Flora dan Fauna Tahura Wan Abdul Rachman	55
4.2.6 Potensi Wisata Alam Tahura Wan Abdul Rachman	56
4.2.7 Aksesibilitas Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman	58
4.2.8 Luas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman Yang Telah Direhabilitasi.....	59
4.2.9 Desa-Desa Sekitar Tahura Wan Abdul Rachman	60

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	61
5.1.1 Tahap Perencanaan.....	61
1. Strategi melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu.....	62
2. Strategi membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhadap <i>illegal logging</i>	65
3. Strategi melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap <i>illegal logging</i>	70
5.1.2 Tahap Pengorganisasian	72
1. Strategi melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu.....	72
2. Strategi membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhasdap <i>illegal logging</i>	75
3. Strategi melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap <i>illegal logging</i>	77
5.1.3 Tahap Pengendalian	78
1. Strategi melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu.....	79
2. Strategi membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhasdap <i>illegal logging</i>	87
3. Strategi melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap <i>illegal logging</i>	89

5.1.4 Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam Penanggulangan <i>Illegal Logging</i> di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.....	90
5.2 Pembahasan Penelitian.....	91
5.2.1 Tahap Perencanaan.....	91
1. Strategi melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu.....	91
2. Strategi membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhadap <i>illegal logging</i>	92
3. Strategi melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap <i>illegal logging</i>	94
5.2.2 Tahap Pengorganisasian	95
1. Strategi melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu.....	95
2. Strategi membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhadap <i>illegal logging</i>	96
3. Strategi melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap <i>illegal logging</i>	97
5.2.3 Tahap Pengendalian	98
1. Strategi melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu.....	98
2. Strategi membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhadap <i>illegal logging</i>	99
3. Strategi melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap <i>illegal logging</i>	100
5.2.4 Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam Penanggulangan <i>Illegal Logging</i> di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	101

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	103
6.2 Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kerusakan <i>Illegal logging</i> Kawasan Hutan Lampung Tahun 2015	4
1.2 Data Kekritisian <i>Illegal Logging</i> Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Tahun 2015	5
1.3 Strategi Penanggulangan <i>Illegal Logging</i>	8
3.1 Data Informan	41
3.2 Daftar Dokumen.....	41
4.1 Komposisi PNS (Struktural dan Non Struktural) Tahura Wan Abdul Rachman Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	54
4.2 Luas kawasan hutan yang telah direhabilitasi dari Tahun 2003-2012	59
4.3 Nama-Nama Desa Disekitar Tahura Wan Abdul Rachman	60
5.1 Data Waktu Pelaksanaan Patroli Gabungan Polisi hutan (Polhut)	65
5.2 Daftar Nama Desa Yang Titik-Titik Rawan <i>Illegal Logging</i>	68
5.3 Dokumentasi hasil laporan Patroli Rutin	79
5.4 Kondisi Pal Batas dan Tugu Batas di Resort Padang Tahun 2015 s/d Februari 2016	85
5.5 Contoh Kasus <i>Illegal Logging</i> Di Tahura Wan Abdul Rachman Tahun 2016	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	37
3.1 Analisis Data Model Interaktif	44
4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	53
5.1 Skema Alur Sosialisasi Strategi Penanggulangan <i>Illegal Logging</i>	63
5.2 Pam Swakarsa (Kerjasama Antara Masyarakat, TNI, dan Polri)	69
5.3 Rapat Koordinasi dan Pengarahan Sebelum Patroli Gabungan	73
5.4 Dokumentasi Sosialisasi Masyarakat Pasca Patroli Rutin	78

BAB I PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) hayati dan ekosistemnya merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Pada Tahun 1990 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur mengenai konservasi SDA hayati yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya. UU No. 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Berdasarkan sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta

masyarakat akan diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 5, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam konservasi SDA hayati dan ekosistemnya adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan ekosistemnya.

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan salah satu bagian dari kegiatan konservasi SDA hayati beserta ekosistemnya. UU No. 5 Tahun 1990, Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 (PP No. 108 Tahun 2015) Pasal 36, Tahura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan *Plasma Nutfah*, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan Provinsi Lampung dibagi dalam beberapa jenis yaitu: Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Hutan Konservasi, yang terdiri dari: Taman Nasional (Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan), Kawasan Cagar Alam, Tahura. Kemudian Kawasan Hutan Lindung terdiri dari: Kawasan Hutan Produksi dan Tahura. Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Tahura yang ada di Provinsi Lampung adalah Tahura Wan Abdul Rachman. Untuk mempermudah dan efektivitasnya pengelolaan kawasan Tahura Wan Abdul Rachman maka dibagi menjadi beberapa wilayah *resort* yang masing-masing dikepalai oleh koordinator wilayah.

Kini Provinsi Lampung mengalami permasalahan mengenai *illegal logging* di hutan. Implikasi *illegal logging* dari tersebut adalah 60% kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan. Hal tersebut berdasarkan kutipan yang peneliti dapatkan pada media publikasi "dishutlampung.com", yaitu:

“Kerusakan *illegal logging* hutan secara umum di Wilayah Provinsi Lampung sudah mencapai separuh lebih dari luas hutan yang ada saat ini. Akibatnya, fungsi lingkungan dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu, karena ekosistem keseimbangan alamnya sebagian sudah tidak berfungsi lagi. Jumlah luas hutan di Provinsi ini mencapai 30% dari luas daratan. Sekitar 53% Hutan Negara yang ada sudah dalam kondisi rusak. Provinsi Lampung memiliki luas daratan sekitar 3,3 juta hektar, atau sekitar satu juta hektar 30% diantaranya adalah kawasan hutan Negara. Berdasarkan data yang ada, pada saat ini sekitar 60% kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami kerusakan”. Sumber: (<http://dishutlampung.com/beritamusrem-banghutada>). (diakses 29 mei 2016 pukul 20:45 Wib).

Pada Tahura Wan Abdul Rachman juga terjadi *illegal logging*, salah satunya di hutan register 19 Desa Margodadi yang berada di Kecamatan Way Lima. Fakta ini peneliti dapatkan pada media massa online “*teraslampung.com*”, yang menyebutkan bahwa :

“Kawasan Tahura sudah dibagi menjadi beberapa *resort*, kasus - kasus perusakan hutan masih saja dapat terjadi di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman ini, seperti beberapa waktu lalu bahwa terjadinya *illegal logging* di kawasan hutan register 19 yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kawasan hutan register 19 yang terletak di Desa Margodadi Kecamatan Way Lima ini cukup mengalami kerusakan parah, kebanyakan kerusakan pada kawasan hutan produksi, namun secara lengkap tidak disebutkan seberapa parah kerusakan yang terjadi. Dari 1.004 juta Ha kawasan hutan Lampung 60% telah mengalami kerusakan, yang kebanyakan akibat *illegal logging*. Kabupaten Pesawaran memiliki luas hutan yaitu 36.490 Ha terdiri dari register 19, register 20 dan register 21. Hutan Pesawaran yang termasuk pada kawasan Tahura Wan Abdul Rachman ini pun sudah mengalami 30% kerusakan yang diakibatkan *illegal logging*”. *Sumber: (http://www.teraslampung.com.warga-hentikan-truk-pengangkutkayu. (diakses 29 mei 2016 pukul 20:45 Wib).*

Kerusakan hutan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.1 Kerusakan *Illegal logging* Kawasan Hutan Lampung Tahun 2015

No.	KAWASAN HUTAN DAN LAHAN	LUAS (Ha)	KERUSAKAN / KEKERITISAN	
			LUAS (Ha)	%
A	Kawasan Hutan Negara:	1.005.735,00	544.085,00	54,15
	1) Kawasan Hutan Konservasi	462.030,00	172.704,10	37,38
	2) Kawasan Hutan Lindung	317.615,00	199.235,00	62,73
	3) Kawasan Hutan Produksi	225.090,00	172.146,00	76,48
B	Areal Penggunaan Lain (APL) : (Luas Kawasan Hutan Negara)	2.524.100,00	452.421,17	17,92
JUMLAH		3.528.835,00	996.506,27	28,24

Sumber: Rencana Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dapat dicermati bahwa kawasan hutan dan lahan di Provinsi Lampung memiliki luas sebesar 3.528.835,00 hektar. Luas tersebut dibagi atas 2 (dua) kategori kawasan, yaitu a. Kawasan hutan negara (luas 1.005.734,00 hektar) dan b. Areal penggunaan lain (APL) (luas 2.524.100,00) hektar. Berdasarkan luas keseluruhan hutan dan lahan di Provinsi Lampung, 28,4 % mengalami kerusakan/kekeritisan akibat *ilegal logging* dan didominasi oleh hutan produksi.

Tabel 1.2. Data Kekritisan *Illegal Logging* Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Tahun 2015

No	Kabupaten	SWP DAS	DAS	LMU	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6
1.	Kota Bandar Lampung				
		Sekampung DS	Way Balau	AKIHuHK	125,8
			Way Suka Maju	AKIHuHK	36,3
				AKIHuHK	26,3
		Way Sekampung	Sekampung	AKIHuHK	156,5
	Jumlah				344,9
2.	Pesawaran				
		Sekampung DS	Lempasing	AKIHuHK	17,5
			Way balau	AKIHuHK	261,7
				AKIHuHK	2.067,8
				KIHuHk	106,9
			Way Gerang	AKIHuHK	229,7
				AKITgHK	23,4
			Way Ratai	AKIHuHK	1.064,5
				AKITgHK	31,3
				KiHiHK	65,6
				KIHuHk	99,1
				SKIHuHK	17,2
			Way Suka Maju	AKIHuHK	483,7
				AKITgHK	44,9
				KIHuHk	92,3
			Way Teluk Pandan	AKIHuHK	572,5
				KIHuHk	55,8
		Way Sekampung	Sekampung	AKIHuHK	5.181,3
				KIHuHk	108,8
	Jumlah				17.631,5
	JUMLAH TOTAL				17.976,4

Sumber: Rencana Pengelolaan Rehabilitas Dishut Provinsi Lampung 2016

Dari data di atas dapat dilihat banyak terjadi kerusakan yang disebabkan *illegal logging* pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung kerusakan sangat kritis seluas 5.181,3 Ha. Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman mencakup wilayah Bandar Lampung dan Pesawaran. Wilayah pesawaran memiliki tingkat kekritisian yang tinggi, kerusakan ini dipicu karena akses menuju Tahura Wan Abdul Rachman yang akses jalannya bisa dilalui oleh kendaraan dan daerah cukup luas, sehingga banyak kasus pencurian hasil hutan dan pembakaran kawasan hutan yang kerap terjadi di wilayah ini, seperti yang banyak terjadi kasus *illegal logging* dan pencemaran serta perusakan. banyak terjadi dikawasan hutan Tahura Register 19 Desa Margodadi Kecamatan Way lima. Berbeda dengan kawasan Tahura Wan Abdul Rachman yang masih masuk dalam area Bandar Lampung yang perbandingannya lebih sedikit kerusakan daripada Pesawaran, karena pada wilayah ini akses masuk hutan untuk patroli lebih mudah.

Keadaan ini sudah sering terjadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pun melakukan berbagai cara untuk menghentikanya dengan, contohnya dengan rutin melakukan patroli hutan oleh Polisi kehutanan, mengesahkan Undang-Undang tentang kehutanan. Semua ini dilakukan untuk mengatasi berbagai macam masalah kehutanan yang muncul.

illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Dengan melihat dari sisi strategi diharapkan nantinya dapat diketahui apa saja yang

dilakukan dan menjadi program-program kehutanan Provinsi Lampung, hingga sampai pada tahap pelaksanaan strategi itu sendiri untuk mengatasi kasus *illegal logging*. Setelah itu akan dilakukan juga penginventarisan berbagai kendala yang dihadapi dilapangan.

Pemerintah Provinsi Lampung yang berperan dalam masalah kehutanan adalah Dinas Kehutanan (Dishut). Dinas hutan telah melakukan berbagai upaya pencegahan namun masih saja banyak oknum nakal yang melakukan *illegal logging* Kini kehutanan mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU No. 41 Tahun 1999) pasal 1 Tentang Kehutanan:

- a. Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. Bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

- d. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

Penyelenggara urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang berkaitan dengan Pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pembangunan kehutanan untuk itu maka Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki serangkaian strategi untuk perlindungan, konservasi sumber daya dan Program Rehabilitasi dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Strategi Penanggulangan *Illegal Logging*

No	Strategi
1	Secara interen di dalam tahura melakukan patrol rutin dengan personil Polisi Kehutanan pada lokasi-lokasi yang masih ada kayu.
2	Membentuk Pam Swakarsa dalam rangka membantu pengawasan terhadap <i>illegal logging</i> .
3	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari pengelola kawasan maupun masyarakat disekitar kawasan untuk dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap <i>illegal logging</i> .

Sumber : UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

Salah satu implementasi program strategi tersebut adalah mengenai pengamanan hutan adalah pengoptimalan Polisi Hutan (Polhut). Pengoptimalan Polisi hutan (Polhut) tersebut mengenai fungsi dalam pengamanan hutan baik dari kebakaran hutan dan *ileggal logging* . Menurut *website* resmi kepemilikan pengurus Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Wan Abdul Rachman yang beralamat “tahurawanabdulrachman.com”, dijelaskan bahwa :

“Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan Polisi Hutan, aparat pemerintah dan masyarakat dalam pengamanan hutan dan jugaantisipasi kebakaran hutan serta *illegal logging* dan lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengadakan Apel Siaga Pengamanan Hutan dan Antisipasi Kebakaran Hutan Provinsi Lampung pada hari Kamis, 12 Mei 2016 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Apel Siaga ini dihadiri oleh seluruh Polisi Kehutanan di Provinsi Lampung, perwakilan dari Masyarakat Peduli Api (MPA, perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, perwakilan BPDAS Way Seputih Sekampung, BPKH XX dan Kepala Bidang/UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.” *Sumber* : (<http://tahurawanabdulrachman.com/berita-apel-siaga-polhut-lampung.-html>. diakses pada tanggal 21 Januari 2017).

Berdasarkan data program strategi dan kegiatan tersebut, program perlindungan konservasi SDA bertujuan untuk melindungi Wilayah Tahura Wan Abdul Rachman dari pembalakan liar, pembukaan hutan yang dilakukan secara *illegal* dan kasus-kasus kehutanan yang lain, dan penjagaan hutan lindung, sedangkan tujuan program rehabilitas hutan dan lahan adalah mengembalikan fungsi hutan seperti semula baik dalam fungsi dan kawasannya. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti sekaligus menganalisis Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam menanggulangi *illegal logging* dikawasan hutan Tahura Wan Abdul Rachman.

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Jauch & Glueck dalam Akdon (2011:13). Dengan menggunakan rancangan manajemen strategi, para manajer di semua tingkat dalam organisasi berinteraksi dalam perencanaan dan implementasi.

Akibatnya, konsekuensi berperilaku dari manajemen strategi serupa dengan konsekuensi berperilaku dari pengambilan keputusan partisipatif. Karenanya penilaian yang akurat mengenai dampak formulasi strategi terhadap kinerja organisasi menuntut tidak saja kriteria evaluasi keuangan melainkan juga kriteria evaluasi non-keuangan-ukuran yang menyangkut dampak berperilaku.

Pearce dan Robinson (1997:30) Kemudian Strategi merupakan nafas sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Salusu (1996:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Mengutip salah satu media informasi publik yang beralamatkan “newberkeley.wordpress.com”, dikatakan bahwa:

“Menurut UPT Tahura Wan Abdul Rachman, kerusakan akibat *illegal logging* di Provinsi Lampung yang terjadi sejak tahun 1980 hingga saat ini belum dapat dituntaskan oleh Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sehingga penurunan luas hutan di daerah akan semakin meluas saat ini 70% hutan Lampung terdegenerasi luas areal hutan Lampung setiap tahun menyusut.

Pada tahun 1991 luas hutan di Provinsi Lampung mencapai 1,237 juta Ha lebih (37,48 %), Pada tahun 1999, luas hutan di Lampung 1,444 juta Ha (30,43 %). Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yaitu 1.004.735 Ha atau 30 % dari areal daratan Provinsi Lampung seluas 3.538.500 ha, tapi hampir 50% hutan itu telah mengalami kerusakan. (Sumber: <https://newberkeley.wordpress.com/2015/06/02/kawasan-hutan-di-provinsi-lampung> diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 21.05 Wib)

Permasalahan *illegal logging* tidak pernah selesai dibicarakan. Dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu. kasus yang mencuat ke permukaan hanyalah sebagian kecil

dari praktik *illegal logging* yang melibatkan masyarakat, korporat, aparat, dan pejabat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang berkesinambungan. Sampai sejauh ini, tidak ada satupun peraturan perundangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap *illegal logging*, padahal pengertian menjadi sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk ke dalam lingkup *illegal logging*. Amir (2011:192) menyatakan implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Artinya, apa yang dirumuskan pada strategi dan kebijakan akan diterapkan dalam berbagai program kerja, anggaran dan prosedur-prosedur. Rumusan strategi yang baik tidak ada artinya bila tidak diterapkan dalam implementasi, begitu juga sebaliknya.

Sesuai dengan urian yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Implementasi Strategi Penanggulangan *Illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut pemaparan dari latar belakang, maka dapat di ambil suatu rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana Implementasi Strategi Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung dalam Penanggulangan *illegal logging*?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung dalam Implementasi strategi penangulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan menjelaskan kendala-kendala dari implementasi strategi penanggulangan *illegal logging* oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat secara teoritis dan praktis, adapun beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan suatu kontribusi penelitian bagi jurusan ilmu administrasi negara mengenai analisa pengimplementasian strategi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini adalah sebuah rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya masukan atas implementasi yang telah dilakukan oleh UPTD Tahura Wan Abdul Rachman dalam strategi penanggulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman. Dengan masukan tersebut nantinya akan berdampak kepada implementasi strategi yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Pengertian strategi berasal dari kata Yunani *strategos* atau *stretaus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk yang memenangkan perang dalam Salusu (1996:84) penggunaan kata *strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki Becker dalam Heene dkk (2010:53).

Menurut Jauch & Glueck dalam Akdon (2011:13) menyebutkan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Menurut SAKIP LAN-RI dalam Salusu (1996:84) Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program sebagai berikut ini:

- a. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.
- b. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Menurut Mintzerberg dalam Heene dkk (2010:54) mengemukakan bahwa konsep strategi itu mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi itu mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi itu adalah suatu:

- a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
- b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c. Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya
- d. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Sedangkan menurut Allison (2013:3) Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi: strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai strategi di atas, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin penting mengenai strategi, yaitu:

- a. Strategi adalah cara-cara yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang dituangkan dalam bentuk program dan kebijakan.
- b. Strategi merupakan pola pengambilan keputusan yang dijadikan pedoman dalam memajukan organisasi dan mewujudkan visi dari organisasi.
- c. Strategi yang baik berorientasi ada visi dan misi organisasi.
- d. Strategi hendaknya memiliki perencanaan yang baik.

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi

Ada beberapa tipe dari strategi, seperti yang diungkapkan oleh Kooten dalam Salusu (1996:104), tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

- b. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumberdaya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber- sumber yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Sedangkan menurut Rangkuti (2000:6) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu:

- a. Strategi manajemen, meliputi strategi yang dapat diakuakan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya: strategi pengembangan produk, strategi penerapan, harga, startegi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.
- b. Strategi investasi, merupakan kegaitan yang berorientasi pada investasi, misalnya: apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu defisi baru atau strategi disvestasi, dan sebagainya.
- c. Strategi bisnis, sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya: strategi pemasaran distribusi, strategi produksi, strategi organisasi atau operasional, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strategi yang relevan dengan penelitian ini yaitu menurut Salusu antara lain: *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Strategi organisasi diperlukan untuk membangun misi, tujuan dan nilai-nilai serta inisiatif yang akan dilakukan oleh organisasi, karena gerakan *Civil Society Organization* muncul dari inisiatif masyarakat dan harus memiliki batasan-batasan mengenai apa yang akan mereka lakukan dan untuk siapa. Strategi Program dapat berupa kebijakan dan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri yang akhirnya memiliki dampak bagi sasaran organisasi tersebut. Strategi Kelembagaan dalam penelitian ini berperan untuk melihat dari sisi pengembangan kemampuan organisasi dari *Civil Society Organization* tersebut agar mampu untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

2.1.3 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Salusu (1996:490) dalam setiap organisasi, keputusan stratejik dan rencana stratejik disiapkan oleh kelompok manajemen stratejik. Tugas utama dari kelompok manajemen stratejik yang lazim disebut manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan stratejik lainnya, rencana stratejik, mengevaluasi pelaksanaan keputusan stratejik, atau mengevaluasi implementasi strategi. Beberapa pengertian tentang manajemen strategi dalam Heene (2010:76) diantaranya adalah Houthoofd mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu proses dimana organisasi menata diri demi tercapainya tujuan-tujuan keroganisasian melalui cara:

- a. Analisis strategi yang proporsional,
- b. Perumusan strategi yang dijadikan keunggulannya,
- c. Pengimplementasian strategi yang akurat,
- d. Pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya.

Heene dkk (2010:76) mengartikan manajemen strategi adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Adapun tujuan dari organisasi manajemen strategi adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi. Dengan demikian, manajemen strategi mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan pendekatan sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan dari organisasi, kemudian mengaktualisasikan, memantau dan mengevaluasinya.

Akdon (2011:277) merumuskan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*Implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategi antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya masa datang. Pada hakikatnya, manajemen strategi itu terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu pembuatan strategi meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan pada organisasi, pengembangan alternatif strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, dan penentuan strategi yang sesuai untuk diaplikasikan.

Bryson (1999:4) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik, perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Salusu (1996: 500) juga menyatakan, perencanaan stratejik adalah *instrument* kepemimpinan dan suatu proses. Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi dimasa depan dan bagaimana usaha mencapainya; suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Strategi yang telah direncanakan tidak serta merta berjalan dengan lancar, seperti yang diungkapkan oleh Bryson dkk, dalam Bryson (1999:227) ada empat tantangan yang harus dikendalikan secara efektif dalam perencanaan strategis, yaitu:

- a. Masalah Manusia, adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, keputusan, konflik, dan preferensi kebijakan ditempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi.
- b. Masalah proses adalah manajemen ide strategi menjadi *good currency*. Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang konvensional.
- c. Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan. Lingkungan internal dan eksternal harus manjadi kaitan yang menguntungkan.
- d. Masalah Institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformativ.

Masalah tersulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat dipecahkan hanya melalui transformasi institusi. Transformasi semacam itu tidak dapat terjadi tanpa kepemimpinan yang kuat. Kunci suksesnya implementasi strategi seperti yang diungkapkan oleh Thompson dan Strickland dalam Salusu, (1996:436) adalah menyatukan organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap tugas administratif dilakukan dengan memadukan persyaratan yang tepat sehingga pelaksanaan strategi dapat dinikmati. artinya suatu implementasi yang sukses, membutuhkan dukungan, disiplin, motivasi, dan kerja keras dari semua manajer, kepala-kepala unit kerja dan semua karyawan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai manajemen strategis, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin penting tentang manajemen strategis, yaitu:

- a. Manajemen strategi merupakan proses dari awal perencanaan itu dirumuskan hingga perencanaan itu diimplementasikan dan dievaluasi kembali untuk mengoreksi kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi bisa berasal dari faktor internal organisasi maupun eksternal organisasi akibat perubahan-perubahan yang terjadi, baik pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
- b. Dalam manajemen strategis dibutuhkan perencanaan yang matang, seperti yang diungkapkan oleh Vinzant dalam Heene, (2010:84) perencanaan strategik merupakan tulang punggung dari manajemen strategik.
- c. Manajemen strategi sebagai suatu proses dimana organisasi menata diri demi tercapainya tujuan-tujuan keorganisasian.
- d. Manajemen strategi adalah suatu proses manajemen puncak yang berorientasi pada perencanaan jangka panjang.

2.1.4 Manfaat Manajemen Strategi

Dengan menggunakan rancangan manajemen strategi, para manajer di semua tingkat dalam organisasi berinteraksi dalam perencanaan dan implementasi. Akibatnya, konsekuensi berperilaku dari manajemen strategi serupa dengan konsekuensi berperilaku dari pengambilan keputusan partisipatif. Karenanya penilaian yang akurat mengenai dampak formulasi strategi terhadap kinerja organisasi menuntut tidak saja kriteria evaluasi keuangan melainkan juga kriteria evaluasi non-keuangan-ukuran yang menyangkut dampak berperilaku. Terlepas dari kemampuan (*profitability*) rencana strategik, beberapa efek berperilaku dari manajemen strategik meningkatkan kesejahteraan organisasi menurut Pearce dan Robinson (1997:30) yaitu:

- a. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan organisasi mencegah masalah. Manajer yang mendorong bawahannya untuk menaruh perhatian pada perencanaan dibantu dalam melaksanakan tanggung jawab pemantauan dan peramalan oleh bawahan yang menyadari perlunya perencanaan strategik.
- b. Keputusan strategik yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategik menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok menghasilkan strategi yang lebih beragam dan karena peramalan yang didasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok meningkatkan kemampuan menyaring pilihan.

- c. Keterlibatan anggota dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas imbalan di setiap rencana strategik dan dengan demikian mempertinggi motivasi mereka.
- d. Senjang dan tumpang tindih kegiatan di antara individu dan kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing.

Penolakan terhadap perubahan berkurang. Meskipun para peserta dalam perumusan strategi mungkin tidak lebih senang dengan keputusan mereka sendiri ketimbang jika keputusan diambil secara otoriter, kesadaran mereka yang lebih besar akan parameter-parameter yang membatasi pilihan membuat mereka lebih mau menerima keputusan ini.

2.1.5 Tahap-Tahap Manajemen Strategi

Menurut Siagian (2007:30), terdapat dua belas tahap yang lumrah dilalui dalam proses manajemen strategi yaitu:

1. Perumusan misi organisasi
2. Penentuan profil organisasi
3. Analisis dan pilihan stratejik
4. Penetapan sasaran jangka panjang
5. Penentuan strategi induk
6. Penentuan strategi operasional
7. Penentuan sasaran jangka pendek, seperti sasaran tahunan
8. Perumusan kebijaksanaan
9. Pelembagaan strategi

10. Penciptaan sistem pengawasan
11. Penciptaan sistem penilaian
12. Penciptaan sistem umpan balik.

Sementara itu, menurut David (2005:5) manajemen strategik terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Formulasi

Tahap ini meliputi mengembangkan visi dan misi, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal organisasi, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategi (strategi alternatif), serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Dalam hal penyusunan strategi, David membagi proses ke dalam tiga tahapan aktivitas, yaitu: *input stage*, *matching stage*, dan *decision stage*.

2. Tahap Implementasi

Tahap ini meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber daya agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi. Pada tahap ini, keterampilan interpersonal sangatlah berperan. Strategi bukanlah sekedar aktivitas *problemsolving*, tetapi lebih dari itu strategi bersifat terbuka (*open-ended*) dan kreatif untuk mempertajam masa depan dalam model *chain of*

command dimana suatu strategi harus dijalankan setempat mungkin (menghindari yang tidak perlu dalam setiap bagian struktur organisasi).

2.2. Tinjauan Tentang Implementasi Strategi

2.2.1. Pengertian Implementasi Strategi

Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan, karena implementasi berarti mobilisasi manusia yang ada dalam sebuah organisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Amir (2011:192) menyatakan implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Artinya, apa yang dirumuskan pada strategi dan kebijakan akan diterapkan dalam berbagai program kerja, anggaran dan prosedur-prosedur. Rumusan strategi yang baik tidak ada artinya bila tidak diterapkan dalam implementasi, begitu juga sebaliknya. Implementasi berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Hubeis dan Najib (2008:25), implementasi strategi adalah proses penerapan setelah rencana dirumuskan. Dalam implementasi ada beberapa unsur penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi yaitu penetapan tujuan tahunan, perumusan kebijakan, memotivasi pekerja dan mengalokasikan sumber daya.

Sedangkan, Huff dalam Heene (2010:178) mengungkapkan implementasi strategi merupakan upaya mengkombinasikan antara kebijakan memberikan hadiah berdasarkan kepatuhan akan pelaksanaan atas keputusan-keputusan strategis yang

telah dirumuskan, pengembangan teknik-teknik persuasif untuk menjamin hadirnya partisipasi dari berbagai partisipan (rekanan) selama berlangsungnya proses implementasi termasuk juga dalam meningkatkan intensitas keterlibatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategi. Selain itu, implementasi strategi merupakan kombinasi antara perencanaan strategi dan penerapan strategi yang telah ditetapkan

2.2.2. Model Implementasi Strategi

Menurut Salusu (1996:409) implementasi strategi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu keputusan yang prosesnya terarah dan terkoordinasi serta melibatkan sumber daya. Sifat dari suatu implementasi adalah tidak dapat beroperasi tanpa adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Berikut adalah model-model implementasi strategi beserta indikator-indikatornya:

1. Implementasi strategi menurut Wheelen-Hunger

a. Program

Setelah perencanaan dibuat dalam bentuk yang masih global dan berjangka panjang, maka dibuat dalam bentuk yang lebih detail dan berjangka pendek yaitu berupa proyek-proyek yang akan membentuk suatu program kerja. Program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Amirullah (2015:281) menyatakan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. *Budget* dan Prosedur Kerja

Hunger dalam Husein (2010:21) menyatakan *budget* atau anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk periode di masa yang akan datang. Amirullah (2015:199) menjelaskan prosedur kerja pada dasarnya merupakan rangkaian tata cara pelaksanaan kerja yang berurutan tahap demi tahap yang menunjukkan arus atau proses pencapaian suatu tujuan atau sasaran program.

2. Implementasi program menurut Higgins

a. Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian

Higgins dalam Salusu (1996:435) sasaran yang ingin dicapai oleh strategi harus dijabarkan secara rinci, maka dari itu dibuatkan perencanaan antara dan perencanaan operasional. Perencanaan antara adalah penghubung antara sasaran-sasaran strategi dan perencanaan operasional yang disebut juga program. Program ini mencakup ruang lingkup yang cukup luas, waktu yang memadai, cukup komprehensif dan memiliki rincian detail. Perencanaan operasional berlaku untuk jangka waktu satu tahun dengan tugas menerjemahkan perencanaan kedalam rencana yang pasti yaitu memberi hasil kegiatan yang diinginkan.

b. Kepemimpinan, Motivasi dan Sistem Komunikasi

Gaya kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menggerakkan karyawan menuju sukses. Para manajer hendaknya mampu memberikan motivasi kepada jajaran kepegawaian jika ingin maju. Selain itu sistem komunikasi yang dimiliki harus baik guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

c. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi

Komponen implementasi biasanya ditangani oleh bagian personalia dalam organisasi yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, menempatkan karyawan yang sekaligus mencakup perencanaan personil, perekrutan, saringan, pelatihan dan orientasi. Kedua, berfungsi apabila karyawan sudah mulai bekerja yang mencakup pelatihan dan pengembangan, penyediaan kompensasi dan motivasi, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, evaluasi dan pengendalian, perbaikan produktivitas dan perbaikan komunikasi dalam organisasi.

3. Implementasi strategi menurut Utomo

Aktivitas implementasi strategi akan melibatkan hampir setiap tahap dalam proses manajemen. Ini berarti bahwa implementasi akan masuk pada setiap tahap mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pada akhirnya akan ke dalam fungsi pengawasan.

a. Tahap perencanaan

Menurut Utomo (1993:108) setelah formulasi strategi terbentuk, maka seorang manajer/pemimpin berkewajiban untuk mengembangkan suatu rencana yang rinci untuk kemudian dikomunikasikan ke masing-masing

pihak yang terkait dalam organisasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam proses komunikasi strategi ini antara lain ditentukan bagaimana menyampaikan informasi tentang tujuan yang hendak dicapai, siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan strategi, bagaimana proses alokasi sumberdaya yang dimiliki, dan aktivitas apa yang harus mendapat prioritas untuk dilakukan lebih dahulu bagi kepentingan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

b. Tahap pengorganisasian

Tanggungjawab dan wewenang melaksanakan kegiatan dan program yang ditujukan untuk kesuksesan strategi tidak bisa dibebankan pada satu individu saja, melainkan harus dialokasikan diantara anggota unit organisasi. Yang lebih penting adalah lagi adalah, bahwa aktivitas dan tanggung jawab tersebut harus ada yang mengkoordinasikan dan mengendalikan sehingga masing-masing komponen dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c. Tahap pengendalian

Organisasi membutuhkan fungsi pengendalian untuk dapat menilai apakah perpaduan strategi yang dipergunakan mampu mencapai kinerja organisasi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini organisasi harus mampu mengembangkan bentuk pengendalian yang sesuai seperti halnya untuk memonitor tentang perubahan faktor lingkungan dan meneliti kesesuaian asumsi yang dipergunakan dalam formulasi strategi.

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Strategi

Heide dalam Heene (2010:181) menyatakan bahwa kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu;

a. Sistem informasi dari organisasi

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan juga continue yang mencakup ke seluruh bagian organisasi.

b. Kemampuan proses belajar dari organisasi

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu mengimplementasikan strategi dengan sukses.

c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan akan sulit untuk mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil.

d. Struktur organisasi yang baku

Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur informasi, monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.

e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas.

f. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi

Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang mereduksi kekuasaan dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat upaya implementasi.

g. Kultur dari organisasi

Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif.

2.2.4 Kendala-Kendala Dalam Implementasi Strategi

Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis di sektor publik, terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap (struktural atau prosedural) yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut. Adapun kendala yang terjadi di sektor publik dalam penerapan manajemen strategis, menurut Taufiqurokhman (2016:41) adalah :

- a. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya, dimana sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor publik sangat fleksibel dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan, harus melakukan *cross check* dengan undang-undang yang telah ada sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut.
- b. Karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya, maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta. Hal ini menjadikan setiap kinerja organisasi tersebut akan menjadi sorotan rakyat apabila visi dan misi maupun program yang diusung jauh dari harapan rakyat (pengguna layanan) yang ke depannya secara tidak langsung, dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan negara (misal dengan para rakyat berdemonstrasi maupun membuat kerusuhan).
- c. Adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi. Yaitu prosedur pemerintah yang kadang rumit, berjenjang dan kaku, sehingga memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas/masalah. Pegawai dalam bekerja pun kurang profesional dan masih terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di beberapa lini, membuat pemerintah membentuk pengendalian internal dan external dalam rangka menertibkan dan mendisiplinkan para pegawai tersebut.

- d. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuannya dan mengukur hasilnya (*outcome dan impact*).
- e. Keterbatasan informasi bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Hal ini biasanya muncul karena adanya pembelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi. Para manajer pelaksana dapat memberikan informasi yang salah dengan harapan memberikan kesan positif terhadap kinerja mereka yang sebenarnya menurut kondisi nyata tidak cukup baik.

2.3 Tinjauan Tentang *Illegal Logging*

Menurut pendapat Kartodiharjo (2006:35), *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Interuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 (Inpres No. 5 Tahun 2001), tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil hutan *illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *illegal logging* dan perdagangan internasional kayu *illegal* adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak di negara berkembang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah miliaran dolar pendapatan yang hilang, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik dan dana bersenjata. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan di beberapa negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumen berkontribusi masalah ini dengan mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan bahwa mereka secara hukum bersumber. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun negara-negara produsen dan konsumen sama-sama meningkatkan perhatian *illegal logging*.

Sementara dalam UU No. 19 Tahun 2004 dan UU No. 41 Tahun 1999 tidak mendefinisikan secara jelas *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*. Kategori *illegal logging* menurut Pasal 50, antara lain mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan *illegal logging*.

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnnya atau belum ada izinnnya atau izin yang telah kadaluarsa
2. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan

3. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi atau lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan
4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sah nya kayu
6. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.

2.4 Dampak *Illegal logging*

Kartodiharjo (2006:76) mengatakan bahwa *Illegal logging* berdampak pada gangguan/kerusakan pada berbagai ekosistem yang menyebabkan komponen-komponen yang menyusun ekosistem, yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu. akibatlah terjadi kepunahan pada berbagai varies hayati tersebut.

Dampak lainnya banjir, pohon-pohon ditebangi sehingga jumlahnya semakin hari semakin berkurang menyebabkan hutan tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dengan jumlah yang besar, sehingga air tidak dapat meresap kedalam tanah sehingga bisa menyebabkan banjir, seperti yang terjadi belum lama ini banjir bandang di Wasior, Papua yang menewaskan hampir 110 orang. Masyarakat tetap miskin dan menjadi korban atas kecurangan perilaku cukong-

cukong yang pada akhirnya merekalah yang menikmati sebagian besar hasil usaha masyarakat. Inilah yang menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Semakin berkurangnya jumlah cadangan sumber air tanah atau mata air didaerah hutan. Karena jumlah pohon-pohonnya semakin berkurang padahal pohon berfungsi sebagai penyerap air. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekeringan, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan kekurangan air untuk irigasi.

Dampak yang paling kompleks dari adanya *illegal logging* ini adalah *Global Warming* yang sekarang sedang mengancam dunia. *Global warming* terjadi oleh efek rumah kaca dan kurangnya daerah resapan CO₂ seperti hutan sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan kenaikan volume air muka bumi karena es di kutub mencair.

2.5 Kerangka Pikir

Masalah *illegal logging* merupakan masalah klasik di seluruh penjuru Indonesia ini di Lampung pun mengalami masalah *illegal logging* maka dari itu pemerintah telah membentuk suatu cara untuk dapat mengatasi hal tersebut. Mulai dari badan yang mengurus masalah kehutanan, kemudian mengurus areal teritorial secara yuridis, dan mengurus masalah strategi penanggulangan dan secara teknis.

Secara organisasi di Propinsi Lampung mempunyai Dinas Kehutanan yang menangani masalah areal, perlindungan, dan penjagaan serta pelestarian hutan Wilayah Propinsi Lampung lembaga ini merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang menggunakan anggaran dana pemerintah. Walaupun masalah

illegal logging tidak hilang begitu saja, melihat dari data buktinya masalah *illegal logging* masih menjadi masalah kehutanan nomor 1 yang menyebabkan kerusakan hutan, oleh karena itu peneliti tertarik menganalisis dan mendeskripsikan strategi Dinas kehutanan Propinsi Lampung dalam mengatasi kasus *illegal logging* dan nantinya dapat di masukkan sebagai bahan pertimbangan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dalam implementasi strateginya.

Implementasi strategi akan dianalisis berdasarkan aspek implementasi menurut Utomo :

1. Tahap perencanaan

Menurut Utomo (1993:108) setelah formulasi strategi terbentuk, maka seorang manajer/pemimpin berkewajiban untuk mengembangkan suatu rencana yang rinci untuk kemudian dikomunikasikan ke masing-masing pihak yang terkait dalam organisasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam proses komunikasi strategi ini antara lain ditentukan bagaimana menyampaikan informasi tentang tujuan yang hendak dicapai, siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan strategi, bagaimana proses alokasi sumberdaya yang dimiliki, dan aktivitas apa yang harus mendapat prioritas untuk dilakukan lebih dahulu bagi kepentingan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

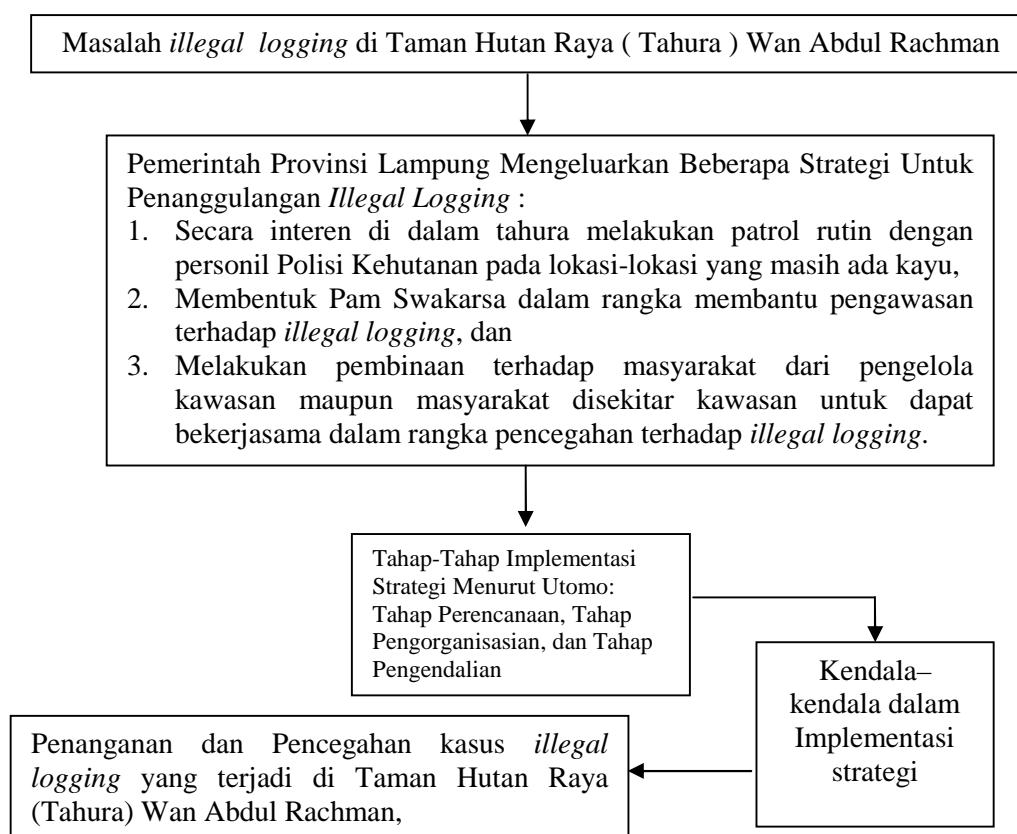
2. Tahap pengorganisasian

Tanggungjawab dan wewenang melaksanakan kegiatan dan program yang ditujukan untuk kesuksesan strategi tidak bisa dibebankan pada satu individu saja, melainkan harus dialokasikan diantara anggota unit organisasi. Yang lebih penting adalah lagi adalah, bahwa aktivitas dan tanggung jawab tersebut

harus ada yang mengkoordinasikan dan mengendalikan sehingga masing-masing komponen dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Tahap pengendalian

Organisasi membutuhkan fungsi pengendalian untuk dapat menilai apakah perpaduan strategi yang dipergunakan mampu mencapai kinerja organisasi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini organisasi harus mampu mengembangkan bentuk pengendalian yang sesuai seperti halnya untuk memonitor tentang perubahan faktor lingkungan dan meneliti kesesuaian asumsi yang dipergunakan dalam formulasi strategi.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2016

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2011:3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian tersebut karena dalam penelitian ini, peneliti telah menggambarkan dan menjelaskan aktivitas, kegiatan, dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam menangani masalah *Illegal logging* di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Moleong (2011:237) mengatakan bahwa penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penataan fokus membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian jadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Analisis Implementasi Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam menanggulangi masalah *Illegal logging* di lapangan. Dalam analisis yang dilakukan peneliti menggunakan teori implementasi strategi yang diutarakan Utomo. Indikator-indikator yang digunakan antara lain: tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, dan pengendalian.
2. Berbagai kendala yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam implementasi strategi dan program di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut Moleong (2011:128) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan didalam lingkup Provinsi Lampung yaitu di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Tahura Wan Abdul Rachman. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan: Dinas Kehutanan provinsi Lampung merupakan lembaga resmi pemerintah yang konsen menangani masalah-masalah yang timbul di Wilayah Kehutanan Provinsi Lampung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara.

Sumber data yang berasal dari informan melalui kata-kata langsung dan tanya jawab disebut dengan wawancara. Bungin (2007:111) Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama dengan menggunakan panduan wawancara. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang memahami mengenai implementasi strategi penanggulangan *illegal logging* pada Tahura Wan Abdul Rachman. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan Informan	Tanggal Wawancara
1.	Bapak Sumardi S.Hut.M.M	Pimpinan Uptd Tahura	16 Februari 2017
2.	Bapak Yuridis S.H	Polisi Hutan (Polhut)	23 Februari 2017
3.	Bapak Bahrudin	Kepala Desa Margodadi Kecamatan Way Lima	20 Februari 2017
4.	Bapak Najib	Masyarakat Desa Margodadi Kecamatan Way Lima	09 Agustus 2017

Sumber diolah Oleh Peneliti 2016

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-menyurat, peraturan pemerintah, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan merupakan data sekunder sebagai penguat penelitian yang berkaitan dengan penanganan *Illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman. Adapun beberapa dokumen yang telah peneliti dapatkan antara lain:

Tabel 3.2 Daftar Dokumen

No	Nama Dokumen	Substansi
1.	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990	Peraturan Pemerintah
2.	Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015	Peraturan Pemerintah
3.	Data kerusakan hutan akibat <i>illegal logging</i> tahun 2015	Data kerusakan hutan
4.	Data Kekritisian <i>Illegal Logging</i> Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Tahun 2015	Data kekritisian <i>illegal logging</i> Tahura Wan Abdul Rachman
5.	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999	Peraturan Pemerintah
6.	Strategi Penanggulangan <i>illegal logging</i>	Penjabaran strategi penanggulangan <i>ilegall logging</i>

Sumber diolah Oleh Peneliti 2017

3. Observasi

Observasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Lapangan

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh di lapangan mengenai implementasi strategi penanggulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman telah dianalisis. Analisis Data menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:103) yaitu sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Sedangkan menurut Moleong (2002:103) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Teknik Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Emzir (2012:129). Berikut tahap-tahap analisis data kualitatif:

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan bahkan diakhir penelitian, ideanya, proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika peneliti masih berupa konsep atau draf. Bahkan, menurut Creawell dalam Herdiansyah (2012:164) menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya sudah berfikir dan melakukan analisis ketika peneliti kualitatif baru dimulai. Dalam pengumpulan data ini tidak ada waktu yang spesifik dan khusus yang disediakan untuk proses pengumpulan data, karena sepanjang peneliti berlangsung, sepanjang itu pula proses pengumpulan data yang diperlukan. Dimana peneliti sudah melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Dimana peneliti sudah melakukan pra riset dan riset mengenai implementasi strategi penanggulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian, kata yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan memudahkan mencari kembali apabila diperlukan. Reduksi data pada penelitian ini diantaranya: merekap hasil wawancara dengan informan kemudian juga melakukan pengamatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi strategi Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dalam menangani kasus *illegal logging* di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

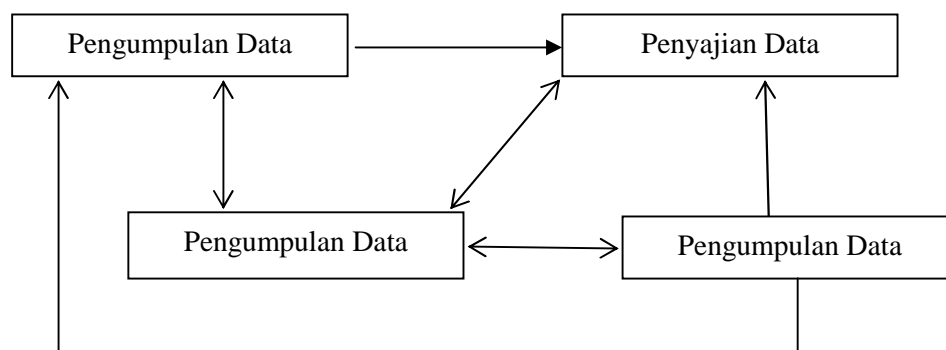
c. Penyajian Data

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi implementasi strategi Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dalam menangani kasus *illegal logging* di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto dan bagan.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Berikut ini bagan penjelasan analisis data model interaktif yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman dikutip oleh Emzir (2012:129)

3.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Moleong (2002:173) ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

1. Derajat Kepercayaan

Kriterium derajat Kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriterium ini berfugsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Untuk menjamin keabsahan data melalui derajat kepercayaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan data, yaitu:

a. Triangulasi

Menurut Moleong (2002:330) mengemukakan bahwa “triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya mengecek kebenaran data membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lainnya”. Data dalam penelitian ini adalah data mengenai implementasi strategi Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dalam menangani kasus *illegal logging* di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

2. Keteralihan

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.

3. Kebergantungan

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Konsep kebergantungan lebih luas dari pada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. Bagaimana hal itu dicapai akan dibicarakan dalam konteks pemeriksaan.

4. Kepastian

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Jika nonkualitatif menekankan pada orang, maka penelitian alamiah menghendaki agar penekanan bukan pada orangnya, melainkan pada data. Dengan demikian kebergantungan itu bukan lagi terletak pada orangnya, melainkan pada datanya itu sendiri. Jadi isunya disini berdasarkan data.

Disini Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara kepada sumber berbeda dari berbagai informan yang berbeda, kemudian hasil wawancara dikategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda dan spesifik. Maka dari itu, peneliti melakukan triangulasi hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Hasil wawancara adalah segala macam informasi yang didapatkan mengenai implementasi strategi Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dalam menangani kasus *illegal logging* di Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Visi dan Misi pembangunan Kehutanan Provinsi Lampung juga mengacu pada itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019, yaitu : “Lampung maju dan sejahtera 2019”. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan beberapa misi yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
- b. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama.
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
 - Transformasi budaya Lampung dan pemantapan toleransi kehidupan beragama.
- d. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- e. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan penjabaran beberapa misi untuk mencapai visi Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan berperan dalam pencapaian misi pertama dan keempat (misi *point a* dan *point d*). Tujuan misi pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dengan sasaran peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung. Tujuan misi keempat adalah mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dengan sasaran peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor. 34 Tahun 2010 (Pergub No. 34 Tahun 2010) tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung, Dishut Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang kehutanan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi, dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dishut Provinsi Lampung memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan termasuk rencana makro kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional lintas

kabupaten/kota, termasuk tugas-tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan provinsi.

- b. Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung serta taman hutan raya lintas kabupaten/kota.
- c. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan.
- d. Pengawasan perbenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala Provinsi.
- g. Perlindungan dan pengamanan pada kawasan hutan skala Provinsi.
- h. Penyusunan pedoman dan penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- i. Penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
- j. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu skala Provinsi.
- k. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.

- l. Pemberian pertimbangan teknis perizinan skala Provinsi, meliputi pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan.
- m. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan.
- n. Pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah) unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi skala Provinsi.
- o. Pelaksanaan penilaian dan pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit KPH dalam wilayah Provinsi.
- p. Turut serta secara aktif dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan.
- q. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- r. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan.
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Menurut Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2009 (Perda No. 13 Tahun 2009) dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 (Kepgub No. 62 Tahun 2014) tentang penghapusan keberadaan UPTD inventarisasi dan pemetaan hutan (UPTD IPH), struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan).
- c. Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- d. Bidang Pengusahaan Hutan.
- e. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Hutan.
- f. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD.

Dishut Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) UPTD, yaitu : UPTD Tahura Wan Abdul Rachman, UPTD KPH Batutege, UPTD KPH Gedong Wani, dan UPTD KPH Muara Dua.

4.2 Profil Tahura Wan Abdul Rachman

4.2.1 Tugas dan Fungsi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

Menurut Rencana Strategis (Renstra) Dishut Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, UPTD Tahura Wan Abdul Rachman memiliki tugas melaksanakan pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman.

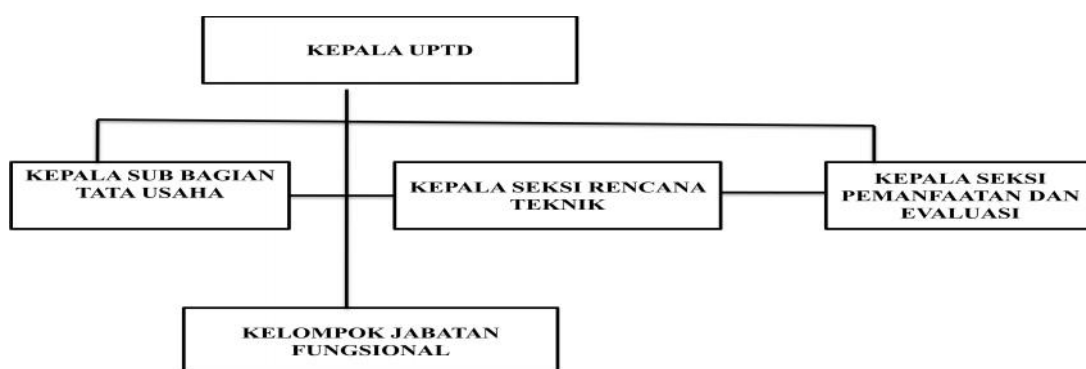
Adapun fungsi Tahura Wan Abdul Rachman, antara lain :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan prasarana pengelolaan tahura.
- b. Pengaturan dan penyiapan sarana dan prasarana pengelolaan tahura.

- c. Pengaturan dan penertiban perizinan, pemanfaatan, dan pengusaha di kawasan tahura.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Dishut.

4.2.2 Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

Berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, UPTD Tahura Wan Abdul Rachman memiliki bagan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Untuk mempermudah dan efektivitas pengelolaan kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, maka wilayah tahura dibagi dalam beberapa wilayah *resort* yang masing-masing dikepalai oleh koordinator wilayah (belum menjadi struktural) dengan personil dari unsur teknis dan pengamanan hutan. Wilayah *resort* tersebut meliputi :

- a. *Resort I Youth Camp*
- b. *Resort II Padang Cermin*
- c. *Resort III Way Sabu*
- d. *Resort IV Bandar Lampung*

- e. *Resort V* Kedondong-Way Lima
- f. *Resort VI* Gedong Tataan

4.2.3 Komposisi SDM UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

Berikut ini gambaran komposisi SDM UPTD Tahura Wan Abdul Rachman dengan berbagai latar belakang pendidikan :

Tabel 4.1 Komposisi PNS (Struktural dan Non Struktural) Tahura Wan Abdul Rachman Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Struktural	S1 = 4	4
2.	Non Struktural	S1 = 6	24
		SLTA = 18	
		SMP = 1	
3.	Polhut	SLTA =17	17
TOTAL			45

Sumber : Renstra Dishut Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

4.2.4 Letak Geografis Tahura Wan Abdul Rachman

Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman secara geografis terletak diantara $105^{\circ} 02'42,01''$ sampai dengan $105^{\circ} 13'42,09''$ BT dan $05^{\circ} 23'47,03''$ s/d $05^{\circ} 30' 34,86''$ LS mencakup luas areal 22.249,31 Ha.

Berdasarkan administrasi pemerintahan kawasan ini berada di lintas Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran (dahulu masuk Kabupaten Lampung Selatan), dengan 7 (tujuh) wilayah kecamatan, 39 desa. Sedangkan batas kawasan Tahura Wan Abdul Rachman memiliki panjang batas *Wiling* 106.665,80 meter, terdiri dari batas buatan (pal batas B/THR) sepanjang 83.191,31 meter, dan batas *slam* (sungai) 17.985,56 meter *serfs* batas *enclave* (buatan) 5.488,93 meter (untuk *enclave* I sepanjang 3.615,82 m dan *enclave* II sepanjang 1.873,11 m). Jumlah pal

batas buatan (B[THR) sebanyak 1.050 pal (BITHR 1 s/d B/THR 1.050), pal batas enclave I sebanyak 20 pal (E.1 s/d E.20) dan enclave II sebanyak 30 pal (E.1 s/d E.30).

4.2.5 Jenis-Jenis Flora dan Fauna Tahura Wan Abdul Rachman

Jenis-jenis flora yang terdapat di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, terutama pada hutan primer antara lain: jenis merawan (*Hopes mangarawan*), medang (*Litsea firmahoa*), rasamala (*Altingia excelsa*), bayur (*Pterospermum sp.*), jabon (*Antocep~jlus cadamba*), cempaka (*Beilschildia sp.*), pulai (*Alstonia scholaris*), kenanga (*Cananga odorata*) dan lain-lain, serta jenis anggrek hutan dan paku-pakuan.

Pada hutan sekunder dapat dijumpai jenis durian (*Durio sp*), makaranga (*Macaranga gigantea*), kenanga (*Cananga odorata*), jabon (*Antocephalus cadamba*), Vitex (*Vitexsp*), bambu betung dan lain-lain. satwa yang terdapat dikawasan ini dan diperkirakan menghuni di hutan primer seperti Siamang (*Symphalagus syndactilus*), Kera (*Macaca fascicularis*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Babi Hutan (*Suscrofa sp*), Ayam Hutan (*Galusgalus*) serta berbagai jenis burung.

Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman adalah termasuk dalam hutan tropis dengan topografi dibentuk oleh daerah perbukitan dan pegunungan yang bervariasi mulai dataran landai, curam dan sangat curam. Dataran landai meliputi kawasan dengan luas ± 675 Ha, bergelombang serta agak curam ± 3.650 Ha dan curam $\pm 17.924,31$ Ha. Kawasan ini memiliki ketinggian mulai 50 meter s/d 1661 meter dari permukaan air laut (dpl). Daerah tertinggi terdapat di puncak Gunung

Pesawaran (1.661 meter), Gunung Betung (1.240 meter) dan Gunung Tangkit Ulu (1.660 meter). Berdasarkan interpretasi Citra Landsat TM-8 Tahun 2015 dengan referensi groundcek lapangan dan penggunaan Citra Resolusi sedang dan tinggi (pemanfaatan *Google earth* dan *Quickbird* tahun 2006) Penutupan lahan (*Landcover*) pada kawasan Tahura Wan Abdul Rachman terdiri dari :

- a. Vegetasi Hutan Primer. Vegetasi hutan primer dikawasan ini pada umumnya terdapat didaerah-daerah perbukitan dan pegunungan, yaitu daerah sekitar puncak Gunung Betung, dan Gunung Pesawaran tahun 2015 dengan luas $\pm 3.304,74$ Ha.
- b. Vegetasi hutan sekunder dan kebun campuran terdapat pada bagian kawasan yang telah mengalami gangguan, terutama pembukaan lahan pada masa lampau kemudian berangsur perubahan menjadi hutan sekunder dan Kebun campuran dengan luas $\pm 12.968,07$ Ha.
- c. Tanaman monokultur dan ladang. Vegetasi monokultur dan ladang terdapat pada kawasan yang mengalami gangguan, terutama pembukaan lahan akibat perambahan pada masa lampau dan masa sekarang dan hanya ditanami tanaman monokultur seperti kopi, atau tanaman semusim lainnya dengan luas $\pm 5.976,5$ ha.

4.2.6 Potensi Wisata Alam Tahura Wan Abdul Rachman

Salah satu fungsi Tahura adalah untuk pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi alam. Potensi alam berupa keunikan keunikan alam seperti air terjun, sumber air panas, batu lapis, pemandangan pantai dan koleksi tanaman sangat mendukung untuk dikembangkannya pariwisata dan rekreasi alam di Tahura Wan Abdul Rachman.

Letak yang strategis dengan aksesibilitas yang baik dari ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, menjadi kekuatan bagi pengembangan Tahura WAR sebagai obyek wisata unggulan. Dengan waktu tempuh tidak lebih dari 1 jam dari kota Bandar Lampung, wisatawan tidak memerlukan banyak waktu untuk menikmati obyek wisata yang terdapat di Tahura Wan Abdul Rachman.

Melihat kecendrungan minat masyarakat untuk kembali ke alam (*back to nature*), maka pengembangan Tahura Wan Abdul Rachman sebagai salah satu obyek wisata alam terbuka (*outdoor recreation*) memiliki prospek yang baik. Selama beberapa tahun terakhir kunjungan wisata Tahura Wan Abdul Rachman menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan kunjungan wisata di Tahura Wan Abdul Rachman telah memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa obyek wisata yang telah mulai dikembangkan atau potensial untuk dikembangkan:

- a. *Youth Camp*, fasilitas dan kegiatan yang telah dikembangkan antara lain : pusat Penangkaran Satwa Langka Sumatera, koleksi tumbuhan Indonesia (bekerjasama dengan PT. Nestle Indonesia), Sarana perkemahan dan *outbond*, Pemandangan alam, piknik keluarga, tempat peristirahatan, jalur lintas alam, tempat pendidikan, latihan, dan penelitian.
- b. Sumber Agung Tahura Wan Abdul Rachman, terdiri dari: penangkaran rusa, penangkaran kupu-kupu, rumah Pohon, Air Tejun Batu Lapis, penangkaran anggrek, dan *agroforestry park*.

- c. Kawasan Wiyono, kegiatan yang akan dikembangkan antara lain air terjun, pondok wisata, pemandian alam, bumi perkemahan, dan jalan setapak menuju ke Keramat di Puncak Gunung Betung.
- d. Air terjun, antara lain: Air terjun Way Sabu, Air terjun Gunung Tanjung, Air terjun Batu Lapis Mata Dewa (Sukawera), Air terjun Pelangi (Citiis), Air terjun Talang Mulya, Air terjun Batu Perahu, Air terjun Kupu Jambu, Air terjun Tawon, Air terjun Sinar Tiga/ Air terjun Kabut dan Air terjun Way Awi.
- e. Pemandangan Alam. Antara lain berada di : Bogorejo, Wiyono dan Sungai Langka, Beringin Raya, Sukadana Ham dan Hurun, Sidodadi, Gebang, Padang Cermin, dan Pesawaran Indah. Secara keseluruhan pemandangan yang tampak adalah kawasan yang berada di sekitarnya antara lain: Teluk Ratai, Kota Bandar Lampung. Wilayah Kecamatan di bawahnya juga dapat dilihat pemandangan *sunrise* dan *sunset*.
- f. Keunikan alam. Terdapat pada lokasi : Batu Lapis, Bambu Betung, Sumber Air Panas, dan Batu Keramat.
- g. Agrowisata, khususnya pengembangan tanaman yang berbasis kehutanan maupun MPTS yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, diantaranya adalah aren beserta proses produksinya menjadi gula merah dan kolang-kaling, karet, kakau, kopi, durian, pala, petal, manggis, duku dan melinjo.

4.2.7 Aksesibilitas Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman

Tahura Wan Abdul Rachman relatif mudah dicapai dari Kota Bandar Lampung karena dilingkari oleh poros jalan Kota Bandar Lampung ke Padang Cermin (kota kecamatan) sepanjang ± 40 Km di sebelah selatan kawasan, dan rute jalan raya

Kota Bandar Lampung – Gedong Tataan – Kedondong (kota kecamatan) sepanjang ± 50 Km di sebelah utara kawasan.

Dengan demikian untuk mencapai bagian tertentu dari kawasan ini seperti air terjun di Hurun, Wiyono dan lokasi *Youth Camp Center* (areal wisata perkemahan) dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor), dengan waktu tempuh ± 30 menit. Beberapa areal lain seperti lokasi pemanfaatan wisata rumah pohon, air terjun batu lapis, *deck* pengamatan tahura dan koleksi satwa penangkaran rusa, taman kupu-kupu pengelolaan hutan bersama masyarakat (*social forestry*) di lokasi Sumber Agung dapat ditempuh ± 15 menit (jarak ± 15 Km).

4.2.8 Luas Kawasan Hutan Tahura Wan Abdul Rachman Yang Telah Direhabilitasi

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada lapangan, luas hutan Tahura Wan Abdul Rachman yang telah direhabilitasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Luas kawasan hutan yang telah direhabilitasi dari Tahun 2003-2012

No.	Tahun I	Luas (Ha)	Keterangan
1.	2003	1-3M	GERHM
2.	2004	1.462	GERHAN dan APBD (PHBM)
3.	2005	1.450	GERHAN dan APBD (PHBM)
4.	2006	738	GERHAN dan APBD (PHBM)
5.	2007	2.200	GERHAN
6.	2008	-	Tidak ada kegiatan rehabilitasi
7.	2009	-	Tidak ada kegiatan rehabilitasi
8.	2010	3.200	DAK dan RHL
9.	2011	1.845	DAK dan APBN
10.	2012	484	DAK
	JUMLAH	12.767	

Sumber : UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

4.2.9 Desa-Desa Sekitar Tahura Wan Abdul Rachman

Beberapa desa yang berada pada sekitar kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, peneliti jabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Nama-Nama Desa Disekitar Tahura Wan Abdul Rachman

No	Desa/kelurahan	Kecamatan	Resort Tahura Wan Abdul Rachman
1	Keteguhan	Teluk betung barat	Bandar lampung
2	Sukarame II	Teluk betung barat	Bandar lampung
3	Batu putu	Teluk betung barat	Bandar lampung
4	Kedaung	Teluk betung barat	Bandar lampung
5	Sumber agung	Kemiling	Bandar lampung
6	Pinang jaya	Kemiling	Bandar lampung
7	Beringin jaya	Kemiling	Bandar lampung
8	Talang mulya	Teluk pandan	Bandar lampung
9	Cilimus	Teluk pandan	Youthcamp
10	Sukajaya lempasing	Teluk pandan	Youthcamp
11	Tanjung agung	Teluk pandan	Youthcamp
12	Harun	Teluk pandan	Youthcamp
13	Hanura	Teluk pandan	Youthcamp
14	Sidodadi	Teluk pandan	Youthcamp
15	Batu menyan	Teluk pandan	Way sabu
16	Gebang	Padang cermin	Way sabu
17	Padang cermin	Padang cermin	Padang cermin
18	Banjaran	Padang cermin	Padang cermin
19	Hanau berak	Padang cermin	Padang cermin
20	Harapan jaya	Padang cermin	Padang cermin
21	Pesawaran ndah	Padang cermin	Padang cermin
22	Way urang	Padang cermin	Padang cermin
23	Gunung rejo	Padang cermin	Padang cermin
24	Pesawaran	Kedondong	Kedondong way lima
25	Tempel rejo	Kedondong	Kedondong way lima
26	Sinar harapan	Kedondong	Kedondong way lima
27	Babakan loa	Kedondong	Kedondong way lima
28	Banjar negeri	Way lima	Kedondong way lima
29	Padang manis	Way lima	Kedondong way lima
30	Tanjung agung	Way lima	Kedondong way lima
31	Margodadi	Way lima	Kedondong way lima
32	Sukamandi	Way lima	Kedondong way lima
33	Cipadang	Gedong tataan	Kedondong way lima
34	Sungai langka	Gedong tataan	Gedong tataan
35	Wiyono	Gedong tataan	Gedong tataan
36	Kebagusan	Gedong tataan	Gedong tataan
37	Bogorejo	Gedong tataan	Gedong tataan
38	Sukadadi	Gedong tataan	Gedong tataan
39	Sukaraja	Gedong tataan	Gedong tataan

Sumber : UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: implementasi strategi penanggulangan *illegal logging* di Tahura Wan Abdul Rachman oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahap perencanaan dan fungsi pengendalian belum berjalan baik, sedangkan pada tahap pengorganisasian sudah berjalan baik. Pada tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi penanggulangan *illegal logging* yang di laksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada Tahura Wan Abdul Rachman pada tahap perencanaan belum maksimal. Pada fungsi pengendalian belum berjalan maksimal dikarenakan walaupun Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah menugaskan Polisi hutan (Polhut) terjun kemasyarakat dalam Pam Swakarsa, tetapi masih berdampak terdapatnya kasus *illegal logging* pada tahun 2016. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam penanggulangan *illegal Logging* di Tahura Wan Abdul Rachman, antara lain: belum tersedianya *website* sebagai media informasi publik, minimnya sarana dan prasarana, SDM organisasi yang masih minim pemahaman tentang pembinaan masyarakat dalam hal *illegal logging*, dan anggaran biaya yang minim.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Pam Swakarsa yang telah terbentuk, harapan kedepannya tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan strategi patroli gabungan juga kedepannya diharapkan lebih dimanajemen dengan baik.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pasca pelaporan dan kegiatan budaya koordinasi harus tetap dijaga, hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bukan hanya berfokus kepada pengamanan tetapi juga lebih memberi pemahaman mengenai *illegal logging* kepada masyarakat. Sehingga terbentuk korelasi antara pengamanan dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya *illegal logging*.
4. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengoptimalkan fungsi *website* sebagai media informasi publik dengan cara bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam proses pembuatan atau mengadakan pengadaan pembuatan *website*. Tetapi kedepannya Dinas Kehutanan harus menyiapkan SDM yang mengerti dan handal untuk mengelola *website* tersebut.
5. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kedepannya mengusulkan kepada pihak pemerintah mengenai pemenuhan sarana prasarana (seperti peralatan patrol rutin) dalam pelaksanaan strategi penanggulangan *illegal Logging* di Tahura Wan Abdul Rachman. Hal ini dapat diusulkan pada Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas-Dinas.

6. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung semestinya mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung mengenai pemenuhan Sumber daya manusia (SDM) dalam proses *recruitment* kedepannya. SDM tersebut antara lain aparat-aparat yang dapat bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan *illegal logging*.
7. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengusulkan rancangan anggaran biaya program untuk sarana dan prasarana kepada Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam implementasi strategi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2011. *Manajemen Statetik untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Allison, Michael dan Jude Kaye. 2013. *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Amir, Taufik M. 2011. *Manajemen Strtegik Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Bryson, John M. 1999. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Pranada Media Group
- David, Fred R. 2005. *Manajemen Strategis :Konsep*. Jakarta : Salemba Empat
- Emzir.2012.*Metodelogi penelitian pendidikan kuatitatif dan kualitatif*. Bandung : Rajagrafindo Persada
- Herdiansyah,Harif.2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Heene, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Hubeis, Najib. 2008. *Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Husein, Umar. 2010. *Riset Pemasaran dan Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kartodiharjo, H. 2006. *Kebijakan Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta : Magister Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Pearch dan Robinson.1997.*Manajemen Strategis*. Jakarta : Binarupa Aksara

Rangkuti. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Robinson.1997. *Manajemen Strategis*. Jakarta : Binarupa Aksara

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Siagian,Sondang. 2007.*Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : PT. Gunung Agung.

Siagian, Sondang P.2005, *Manajemen Stratejik Edisi Keenam*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Utomo, Hargo. 1993. *E-book. Manajemen Strategik*, Jakarta: Gunadarma

Taufiqurrokhman. 2016. *Mengenal Manajemen Strategi*. Jakarta: Univesitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

Dokumen-Dokumen :

Keputusan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009

Peraturan Gubernur Lampung No. 34 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019

Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Tahura WAR Nomor 824/06/III.18/Thr/2016

Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001

Sumber Website:

<http://dishutlampung.com/berita-musrenbanghutda> (diakses 29 mei 2016 pukul 20:45 Wib)

<http://tahurawanabdulrachman.com/berita-apel-siaga-polhut-lampung.html>.
(diakses pada tanggal 21 Januari 2017)

<http://www.teraslampung.com.warga-hentikan-truk-pengangkut-kayu>. (diakses 29 mei 2016 pukul 20 :45 Wib)

<https://newberkeley.wordpress.com/2015/06/02/kawasan-hutan-di-provinsi-lampung>. (diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 21.05 Wib)